**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI DALAM MENGATASI PENAMBANGAN EMAS
ILEGAL DI KECAMATAN SINGINGI HILIR**

Oleh : M. Al Haudrye Nst

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, S.H.,M.H

Pembimbing 2 : Widia Edorita S.H., M.H

Alamat : Jl. Inpres No. 5B Perumahan Alam Mulia

Email/Telepon : nasutionalhadrye@gmail.com/+62 823-6714-8734

Abstract

Mining activities in Indonesia still receive a negative stigma among the community, especially in Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency, this is due to illegal mining activities or mining without permits which result in more negative impacts. So far, gold mining activities without a permit in Kuantan Singingi Regency, especially Singingi Hilir Subdistrict, have not been disciplined and are directed to have a permit from the local government. Various efforts made by the Kuantan Singingi Regency Government have not been able to overcome illegal mining activities including conducting socialization and counseling and controlling mining activities to avoid the negative impacts caused by these illegal mining activities, Based on these problems, the authors are interested in knowing first, how are local government policies in overcoming Illegal Gold Mining in Singingi Hilir District? Second, what are the obstacles faced by the local government in controlling Illegal Gold Mining in Singingi Hilir District? Third, what are the efforts made by the local government in controlling Illegal Gold Mining in Singingi Hilir District?

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that, firstly, the Regional Government Policy in Overcoming Illegal Gold Mining in Singingi Hilir District by forming an Integrated Team for Controlling Unlicensed Gold Mining (PETI) in charge of socializing, and controlling mining sites. The two obstacles of the Regional Government in Its Policy to Overcome Illegal Gold Mining in Singingi Hilir District include the lack of awareness of the local community towards the law and the environment as well as the presence of irresponsible individuals who back up the PETI activities and the absence of a local regulation that regulates PETI in the District. Kuantan Singingi. Third, Efforts to maximize Local Government Policies in overcoming Illegal Gold Mining in Singingi Hilir District include direct control of PETI locations and socialization to the public about the impact of PETI on the environment in order to increase public awareness.

Keywords : Policy - Government - PETI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala kekayaan sumber daya alam yang di Indonesia telah di atur oleh pemerintah guna menjaga kelestarian kekayaan alam tersebut agar dapat bermanfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Seperti yang disebutkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Bumi,air,dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Dalam mengelola hasil alam, banyak yang menyalahgunakannya hal itu. Jelas sekali melanggar ketentuan hukum karena menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, suatu pertambangan bisa beroperasi dengan syarat harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), pertambangan emas ini harus ditindak tegas agar tidak semakin marak karena bila dibiarkan tanpa ada aturan yang jelas maka akan merusak lingkungan dan infrastruktur lainnya, pertambangan emas ini termasuk dalam kategori pertambangan yang lebih dikenal dengan pertambangan untuk komoditas mineral logam.

Pertambangan Emas Tanpa Izin memang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin, berupa kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Maraknya dilakukan aktivitas PETI ini semenjak masyarakat kesulitan ekonomi dengan jauh turunnya harga karet yang

menjadi andalan pendapatan masyarakat membuat masyarakat mau tak mau melakukan aktivitas PETI ini, walaupun dilarang oleh pemerintah tetapi mau tak mau demi kebutuhan hidup, terpaksa melakukan aktivitas ilegal ini agar kebutuhan hidup sedikitnya bisa terpenuhi.

Walaupun kegiatan penambangan tanpa izin sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam pasal 158 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa: " Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)". Akan tetapi untuk kasus penambangan tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatur tentang izin pelaksanaan serta area legal (resmi) kawasan pertambangan dikarenakan aktifitas PETI tersebut bersifat Illegal (tidak resmi).²

Untuk kasus penambangan tanpa izin sendiri yang termasuk kedalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dibidang pertambangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang mengatasi ini ialah pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kewenangan serta Kebijakan untuk penanggulangan dan pencegahan akibat penambangan emas tanpa izin dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Upaya hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan serta penegakan hukum dan penerapan sanksi secara tegas di sektor pertambangan emas tanpa izin dengan melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan akibat penambangan emas tanpa izin di perlukan pada tingkat pusat dan tingkat daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 158 merumuskan : "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa

¹ Raihan Kurniawan, Erdianto, dan Widia Ederita, Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perambahan Hutan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi, *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VII No. 2 Juli-Desember 2020. hlm. 2.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan latar belakang tersebut serta contoh kasus yang telag dipaparkan penulis, maka saya tertarik untuk mengkaji atau meneliti dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Kuantan Singingi dalam Mengatasi Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Singingi Hilir” sehingga dapat diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana peran serta pemerintah daerah dalam mengatasi pertambangan emas secara illegal di kecamatan Singingi Hilir ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Singingi Hilir?
2. Apa hambatan yang dihadapi pemerintah daerah menertibkan Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Singingi Hilir?
3. Apa upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menertibkan Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Singingi Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Singingi Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai Penelitian yang mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama berkuliah.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para akademisi, sekaligus bahan perbandingan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi dan demi pengembangan pengetahuan hukum.
- c. Bagi Aparat Penegak Hukum, sebagai bahan masukan dan

pertimbangan agar lebih memperhatikan dan dapat menjalankan tugas dan peranannya.

D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Teori juga merupakan suatu cara guna mengklasifikasi fakta, sehingga ke semua fakta tersebut dapat dipahami sekaligus. Adapun kerangka teori yang akan penulis gunakan sebagai dasar analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Teori Kebijakan Publik, Teori Pembangunan Berkelanjutan, teori Kewenangan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan batasan pengertian, dan/atau definisi istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian, diantaranya :³

1. Kebijakan adalah alat untuk mengapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek.⁴
2. Pengaturan adalah tatanan, kaidah atau ketentuan yang menyatakan prinsip bahwa keunggulan hukum dapat membatasi pejabat negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya.⁵

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian pendekatan yang Penelitian ini adalah hukum sosiologis yaitu suatu penelitian

³ *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm. 9.

⁴ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwa, Jakarta, 2004, hlm. 21.

⁵ <https://kbbi.web.id/atur>

terhadap efektifitas hukum yang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum⁶ hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antar *das sollen* dan *das sein*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat yang dituju untuk melakukan segala bentuk penelitian yang digunakan untuk kepentingan pengambilan data dan penyelesaian penelitian tersebut. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Singingi Hilir, Taluk Kuantan.

3. Populasi dan Sampel

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No	Informan	Populasi	Sampel
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.	1	1
2.	Kepala Dinas Pertambangan , Mineral dan Energi	1	1
3.	Camat Singingi Hilir	1	1
4.	Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin	450	10
5.	Masyarakat Singingi Hilir.	326.266	50

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

4. Sumber Data

Data hukum yang disajikan dalam penelitian hukum sosiologis ini diperoleh melalui 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis dapatkan secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan seperti melakukan wawancara hukum terkait penelitian dan permasalahan yang dikaji terutam tentang kasus pertambangan ilegal yang terjadi di Kecamatan Singingi Hilir.

b. Data Sekunder

Dalam Penelitian ini penulis membutuhkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan.⁷

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.16.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2005, hlm. 12.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a Wawancara, metode ini menggunakan cara dengan bertatap muka secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden, yaitu dengan teknik wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk keperluan penelitian penulis.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, selanjutnya diolah dengan cara seleksi, klasifikasi, secara sistematis, logis, dan yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.⁸ Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan, suatu realitas.⁹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertambangan di Indonesia

1) Sejarah Pertambangan Rakyat di Indonesia

Pada tahun 1899 pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Peraturan Pokok Pertambangan diatur dalam Indonesische Mijwet Tahun 1899 Staatsblad 241. Pada masa itu pertambangan-pertambangan besar seperti pertambangan Batubara di

⁸ Darmini Rosa, "Penerapan sistem presidensial dan implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

⁹ *Ibid*, hlm. 72.

Ombilin dan pertambangan timah di Bangka dilakukan oleh Negara. Pada saat yang bersamaan, banyak bertumbuhan pertambangan rakyat. Tetapi belum banyak pengaturan terhadap penambang rakyat tersebut. Perijinan pertambangan rakyat diberikan oleh penguasa setempat dengan cakupan bahan galian seperti timah, emas dan intan.

Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan ekstraksi Mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Sumberdaya mineral merupakan sumber daya alam yang tak terbaharui, artinya sekali bahan galian itu dikeruk maka tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula.¹⁰ Penambangan sebagai proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia.¹¹ Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.¹²

Perkembangan Narkotika modern dimulai pada tahun 1805, ketika Friedrich Wilhelm seorang dokter berkebangsaan Jerman menemukan Senyawa Opium Amoniak yang kemudian diberi nama morfin. Morfin diperkenalkan sebagai pengganti dari opium yang merupakan candu mentah. Sebelumnya di India dan Persia, candu di perkenalkan oleh Alexander the Great pada 330 SM, dimana pada saat itu candu digunakan sebagai tambahan bumbu pada masakan yang bertujuan untuk relaksasi tubuh. Pada tahun 1898, Narkotika di produksi secara massal oleh produsen obat ternama Jerman, Bayern. Pabrik itu memproduksi obat penghilang rasa sakit dan kemudian

diberi nama heroin. Pada tahun itulah Narkotika digunakan secara resmi dalam dunia medis sebagai obat penghilang rasa sakit.¹³

Di Indonesia Sendiri Narkotika telah menjadi permasalahan sebelum Indonesia merdeka, sejak zaman kolonial belanda tahun 1926/1927 dimana bangsa-bangsa Cina mulai marak membuka warung-warung candu yang memiliki nilai ekonomis tersendiri. Atas hal tersebut, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan pengaturan mengenai keberadaan warung-warung candu dan penggunaan Narkotika yang terbatas pada candu mentah, candu masak, candu obat, candu resi, jinjing (ampas candu), morphine, ganja, cocaine, melalui *eogonine staatblat* Tahun 1927 No 278, yang diperbaharui dengan *Staatblat* No 635 tahun 19279.¹⁴

2) Dasar Hukum Izin Pertambangan

Izin usaha pertambangan (IUP) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUP terdiri atas dua tahap yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi. Pemegang IUP baik Eksplorasi maupun operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana yang dicantumkan dalam IUP.¹⁵

¹³<http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarah-h-narkoba-dan-pemberantasannya-di-indonesia>, diakses pada 8 Agustus 2020, pukul 20.00 WIB.

¹⁴ Supriyadi Widodo Edyono, et. al, Kertas Kerja : *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017, Hal. 10

¹⁰ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta, 2006, hlm. 141.

¹¹ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm 53.

¹² Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 6

¹⁵ Fenty U. Puluhulawa. "Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Tinjaun Dari Segi Mekanisme Izin)," *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 19 No.2 . hlm. 180.

Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan mengenai pengertian Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

3) Persyaratan Usaha Pertambangan

Izin usaha lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin sejatinya merupakan suatu instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur cara-cara menjalankan kegiatan usaha.¹⁶ Izin lingkungan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin Lingkungan.¹⁷

B. Pertambangan Tanpa Izin

1) Pengertian Pertambangan Tanpa Izin

Penambang emas tanpa izin (PETI) merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau Perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹⁸ Munculnya kegiatan

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sulit dihindari, karena PETI merupakan salah akses masyarakat kepada sumberdaya alam dan lingkungan. Masyarakat dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi mengelola sendiri sumber-sumber Mineral (emas) yang ada di daerahnya untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi kelompoknya saja, sehingga negatif dampaknya kepada daerah.

2) Faktor Pendorong Adanya Pertambangan Tanpa Izin

Sumantri dan Herman menyatakan bahwa faktor pendorong kehadiran penambang emas tanpa izin dapat dikelompokkan menjadi:¹⁹

- a. Faktor Sosial, yaitu merupakan faktor yang berasal dari keadaan sosial masyarakat setempat meliputi:
 - 1) Keberadaan penambang tradisional oleh masyarakat setempat yang telah berlangsung secara turun - temurun.
 - 2) Hubungan yang kurang harmonis antara pertambangan resmi/berizin dengan masyarakat setempat.
 - 3) Penafsiran keliru tentang reformasi yang diartikan sebagai kebebasan tanpa batas.

3) Penegakan Hukum Dalam Bidang Pertambangan Tanpa Izin

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah mempertahankan berbagai Peraturan Perundang-Undangan beserta peraturan pelaksanaannya yang telah diterbitkan untuk maksud dan tujuan serta untuk menjaring para pelanggar hukumnya

¹⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Ed. Kedua*, Ctk. Kelima, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 94.

¹⁷ Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸ Trisnia Anjami. The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik

Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, *JOM FISIP* Vol. 4 No. 2017, hlm. 6.

¹⁹ Sumantri dan Herman dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Vol. 1, 2017, hlm. 321.

yang tidak bertanggung jawab. Menurut Andi Hamzah,²⁰ penegak hukum sering di salah artikan, seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana, atau hanya dibidang represif.

C. Hukum Pertambangan

1) Konsep Pertambangan

Menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa “pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kegiatan penyelidikan umum sampai dengan pasca tambang ini disebut sebagai usaha pertambangan”.²¹

Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan penambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Artinya pertambangan yang dilakukan tentunya memperhatikan berbagai aspek, yang meliputi pra penambangan, proses penambangan itu sendiri, dan juga memperhatikan pasca penambangan.

2) Pengertian Hukum Pertambangan

Salim HS mengatakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara dengan Negara dengan orang dan atau badan hukum

dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).²²

Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam pengusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini dilakukan pemerintah. Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum tersebut.

3) Asas –Asas Hukum Pertambangan

Menurut Gatot Supramono, hukum pertambangan memiliki empat macam asas hukum yang menjadi tujuan dasar dari usaha pertambangan dilakukan, yaitu:²³

a. Manfaat, Keadilan, dan Kesenambungan

Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.134.

²¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 54

²² *Ibid* hlm. 8

²³ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2012), hlm. 7.

penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan, dan ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila, tepatnya sila ke 5 yang berbunyi “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

D. Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan

1) Perizinan Dalam Kegiatan Pertambangan

Perizinan merupakan instrument hukum lingkungan yang mempunyai fungsi Preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan.²⁴

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkrit menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut

2) Kebijakan Pemerintah Dalam Kegiatan Pertambangan

Kebijakan adalah sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi, hal ini merupakan arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.²⁵ Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya, menurut Ealau dan Pewitt kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang

membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Dari pemaparan definisi teori di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pertambangan merupakan keputusan strategis yang telah diambil pemerintah dalam menjalankan program-program kerja yang berhubungan dengan aktivitas pertambangan yang telah dibuat dan direncanakan dan kemudian dilaksanakan secara konsisten guna mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam bidang usaha pemanfaatan lahan untuk industri pertambangan, aparat pemerintah yang bertugas mengawasi dan membina usaha industri adalah pemerintah daerah sejalan dengan bergulirnya era otonomi daerah, seperti yang tercantum dalam Pasal 14 Huruf (J) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk kabupaten/kota yakni pengendalian lingkungan hidup

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten kuantan singingi atau rantau kuantan merupakan pemekaran dari kabupaten Indragiri Hulu, namun secara resmi Kabupaten Kuantan Singingi berdiri pada tanggal 3 oktober 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya di Taluk Kuantan.

B. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kecamatan Singingi Hilir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, luas wilayahnya 1.530,97 km² atau sekitar 20% dari keseluruhan luas Kabupaten

²⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 95.

²⁵ M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 334.

Kuantan Singingi dengan pusat pemerintahan Kecamatan Singingi Hilir berada di Desa Koto Baru. Di Kecamatan Singingi Hilir ada beberapa desa yaitu Desa Petai, Desa Sungai Buluh, Desa Simpang Raya, Desa Koto Baru, Desa Somber Jaya, Desa Suka Damai, Desa Myara Bahan, Desa Bukit Raya, Desa Beringin Jaya, Desa Sukamaju, Desa Sungai Paku dan Desa Tanjung Pauh. Sampai dengan tahun 2001, kecamatan ini masih berstatus sebagai kecamatan pembantu dan termasuk daerah yang berada di bawah Kecamatan Singingi.

Keadaan geografis Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tingkat Curah hujan: > 1500 mm/tahun, Kemiringan lereng: 0 – 45 derajat, Ketinggian tanah 25-30 meter di atas permukaan air laut, aspek geologi tata lingkungan, adalah morfologi dataran dan sebagian besar perbukitan bergelombang lembah hingga kuat, dengan elevasi 3 sampai 80, berada pada zona bebatuan rapuh, patahan dengan arch N335oE-N340oE. Longsor berpotensi terjadi pada tebing jalan menuju Pekanbaru, erosi pada tebing sungai, gerakan tanah pada daerah yang memiliki batuan rapuh, aspek hidrogeologi, berupa aliran permukaan berupa Sungai Singingi, Sungai Paku, Sungai Sepuh, Sungai Bulus dan Rawa bagian utara dan timur. Cadangan aliran air dalam tanah diperkirakan sebesar 40 juta meter pertahun (bagian barat cekungan Teluk Kuantan).²⁶

C. Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, Kantor Wilayah Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Riau sebagai Instansi Vertikal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Riau diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Dengan demikian terjadi penggabungan Dinas

Pertambangan Tk. I Riau dengan Kanwil Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau menjadi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau. Setelah itu dengan adanya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau beralih nama menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.²⁷

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Pertambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Singingi Hilir.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat di perbaharui maupun yang tidak dapat di perbaharui. Potensi yang sangat berpengaruh di Indonesia yaitu sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui yang berupa bahan galian (tambang). Sumber daya alam, yang berupa minyak dan gas, emas, tembaga, perak, batu bara dan lainnya itu di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya alam, yang berupa migas, emas, tembaga, perak, batubara dan lainnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini telah di tegaskan Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi banyak menimbulkan kerusakan lingkungan berupa pencemaran yang diakibatkan dari dampak aktivitas PETI

²⁶ Data Kantor Camat Singingi Hilir

²⁷ Data Dinas ESDM Provinsi Riau

yang dilakukan oleh masyarakat tanpa mendapatkan izin resmi dari pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi. Dan juga mereka telah melanggar Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Restribusi Izin Pertambangan dan Energi, yang menyebutkan “*bahwa setiap usaha pertambangan dan energi baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin usaha/kuasa pertambangan dan energi*”. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.²⁸

Banyaknya PETI di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di Kecamatan Singingi Hilir ini dilakukan karena memiliki prospek dan sangat potensial dalam meningkatkan ekonomi.²⁹

kebijakan Pemeintah Daerah dalam rangka mengatasi dan mengandalikan serta menertibkan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi serta dalam rangka menerapkan pola pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi yang berwawasan lingkungan, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan berorientasi pada kepentingan kelestarian ekosistem, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memandang perlu upaya khusus untuk menertibkan usaha Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang aktivitasnya dinilai telah memperhatikan, meresahkan masyarakat, dan merusak lingkungan. Adapun upaya Pemerintah Daerah untuk menertibkan usaha PETI tersebut yaitu dengan mengeluarkan suatu kebijakan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi

dengan harapan persolan PETI dapat tertangani dengan baik kedepannya.

B. Hambatan Pemerintah Daerah Dalam Kebijakannya Untuk Mengatasi Pertambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Singingi Hilir

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Menurut Ewick dan Silbey : “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi institusi hukum, yaitu pemahamanpemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.³⁰ Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.³¹ Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap, kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah :

- a. Ketidak pastian hukum;
- b. Peraturan-peraturan bersifat statis;
- c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku

2. Pelaku Penambangan Emas Ilegal (PETI) di Back-up oleh Oknum-oknum yang Tidak Bertanggung Jawab

Selain kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan PETI, tidak dapat dipungkiri aktivitas

²⁸ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Restribusi Izin Pertambangan dan Energi.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Hasan, Penambang Emas Tanpa Izin di Kecamtan Singingi Hilir

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta : 2009, hlm. 510.

³¹ *Ibid* , hlm .511

penambangan emas tanpa izin (PETI) terdapat oknum dibelakang layar dan oknum tersebut memiliki kekuasaan di wilayah mereka. Oknum tersebut mengambil keuntungan dari aktivitas PETI yang menjadi pelindung bagi para pemilik modal. Sudah jelas sikap dari para oknum ini sudah menyalahi aturan penertiban PETI dan merugikan banyak kalangan, meskipun tidak semua oknum aparat yang ikut andil dalam hal tersebut. Alasan pertalian darah atau adanya hubungan keluarga, kerjasama dengan pemodal yang memberikan suap kepada aparat keamanan berupa uang keamanan juga menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penertiban PETI. Menurut informasi tambahan yang penulis dapatkan dari beberapa informan mengatakan bahwa juga terdapat oknum yang menjadi pemilik modal dan menjadikan kerabat mereka sebagai pekerjanya. Sehingga saat terjadi razia aktivitas PETI tersebut tidak dilakukan penertiban. Selain itu para pelaku penambangan emas ilegal ini juga di back-up oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum penegak hukum dan oknum pemerintah. Para pelaku penambangan sering mendapatkan bocoran informasi razia dan penertiban dari oknum itu sendiri. Jika para pelaku sudah mendapatkan bocoran informasi akan dilakukannya penertiban maka para pelaku akan secepat mungkin untuk menyembunyikan alat-alat tambang yang mereka gunakan.³²

C. Upaya Memaksimalkan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Singingi Hilir.

1. Melaksanakan Penertiban

³² Wawancara dengan Bapak Drs.Rustam, Plt.Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 19 Maret 2021 jam 16,15 di kantor dinsa lingkungan hidup di kabupaten kuantan singingig.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengatasi permasalahan Pertambangan Emas Ilegal salah satunya dengan melakukan penertiban langsung ke lokasi pertambangan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Rustam, Plt.Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Melakukan Sosialisasi

Untuk menyadarkan masyarakat pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan sosialisasi PETI yang merupakan kejahatan lingkungan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan air, tanah, dan hutan. Upaya ini dilakukan berulang-ulang, namun perilaku kejahatan tersebut tidak juga berkurang, melihat faktanya itu pemerintah melakukan tindakan dengan aksi penertiban PETI bersama aparat penegak hukum untuk menangkap dan mengadili pelaku kejahatan. Selama penindakan berlangsung hanya segelintir penambang yang bisa ditindak, sementara yang lainnya lari atau kabur dari penertiban, sehingga semua peralatan kerja penambangan emas tanpa izin yang ditemui baik itu kapal/mesin pengisap dan sebagainya dilakukan pemusnahan atau pembakaran.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Pemeintah Daerah dalam mengandalikan serta menertibkan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi serta dalam rangka menerapkan pola pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi yang berwawasan lingkungan, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan berorientasi pada kepentingan kelestarian ekosistem, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memandang perlu upaya khusus untuk menertibkan usaha Pertambangan

Emas Tanpa Izin (PETI) yang aktivitasnya dinilai telah memperhatikan, meresahkan masyarakat, dan merusak lingkungan.

2. Hambatan Pemerintah Daerah dalam mengatasi Pertambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Singingi Hilir diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat setempat terhadap hukum dan lingkungan serta adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengback-up kegiatan PETI tersebut serta belum adanya Perda setempat yang mengatur tentang PETI di Kabupaten Kuantan Singingi dan Tingginya Nilai Ekonomis Pertambangan Emas tersebut membuat masyarakat menjadikan kegiatan pertambangan emas sebagai pemasukan ekonomi yang sangat besar dibandingkan pada sektor perkebunan dan peternakan.

3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pertambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Singingi Hilir dengan membentuk Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013. Tim Terpadu menyusun rencana dalam penanggulangan PETI, melakukan sosialisasi, dan melakukan penertiban ke lokasi pertambangan serta melakukan perbaikan pada lingkungan dengan cara penanaman pohon pelindung agar memperkuat struktur tanah di daerah pertambangan emas yang sudah ditinggalkan.

B. Saran

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi agar lebih fokus dan serius untuk melakukan tindakan penanggulangan Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan

Singingi, melakukan monitoring, sosialisasi dan penertiban secara terus menerus terhadap kegiatan PETI tersebut.

- 2) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Tim Terpadu dan berbagai element harus menjalin komunikasi yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi, karena di dalam sebuah organisasi komunikasi adalah hal yang terpenting untuk mencapai suatu tujuan yang akan dituju.
- 3) Pemerintah harus memberikan sanksi tegas dan mencari solusi terhadap kegiatan PETI tersebut sehingga masyarakat setempat tidak lagi bertumpu pada kegiatan PETI tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A, Suryono A, 2010, *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*, UB Press, Malang.
- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwa, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Edward, G, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset, Yogyakarta.

- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Grindle, Marilee S, 1980, *Politic and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press. New York.
- Hakim, Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang.
- HR, Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*,: Sinar Grafika, Cetakan 1. Jakarta.
- _____, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta. Bandung.
- Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, M.Solly, 2002, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- Marwan, M dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- MD, Mahfud, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, dkk. 2012, *Pembangunan berkelanjutan: dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan*. P3DI, Jakarta.
- N, Sutisna, 2006, *Enam Tolok Ukur Pembangunan Berkelanjutan*, Regional Development Institute, Jakarta.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nogi S. Hesel, 2003, *Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*, Lukman Offset dan YPASI, Yogyakarta.
- Parsons, Wayne, 2006, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana, Jakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed. Kedua, Ctk. Kelima, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan, Juniarso dan Ahmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep kebijaksanaan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Rumidi, Sukandar, tt, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sabbir, Cheema G. Dennis A. Rondineli (Ed.), 1983, *Decentralization and Development: Polity Implementation in Developing Countries*, Sage Publication, Inc, London.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 2005, *Pengantar Penelitan Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2006, *Ilmu Administrasi Publik*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Waluyo, Bambang , 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik: Teori & Proses*, Media Presindo, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Buku Kita, Jakarta.
- Yafie, Ali, 2006, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Artikel/Karya Ilmiah

- Anjami, Trisnia, 2017, The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, *JOM FISIP* Vol. 4.
- Anjami, Trisnia, 2018, Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, *JOM FISIP* Vol. 5 No. 1 April.
- Bianca Darongke, Benedikta 2017, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, *Lex Et Societatis*, Vol. V, No. 10 Desember.
- Hadi Miharja, Meggi Okka dkk, 2015, *Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba di Indonesia*, Privat Law edisi 07 Januari- Juni.
- Kurniawan, Raihan, Erdianto, dan Widia Edorita, 2020, Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perambahan Hutan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi, *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VII No. 2 Juli-Desember.
- Manufactures Finance Co, "equality", *Jurnal Westlaw*" Supreme court of the United States, 193, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada 14 April 2020 dan di terjemahkan oleh google Translate
- Puluhulawa, Fenty U, "Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Tinjaun Dari Segi Mekanisme Izin)," *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 19.
- Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani, 2017, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, *Jurnal Publik*, Vol. 11. No. 01.
- Rosa, Darmini , 2009, "Penerapan sistem presidensial dan implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Menara Yuridis, Edisi III.
- Suandi, I Wayan, 2010, Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. I No. 01.
- Subiyakto, Rudi, 2012, Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah, *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 10, No.1, Februari.
- Sulton A. 2011. Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa (Analisis Sosio-Ekonomi dan Sosio-Ekologi Masyarakat Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, *Skripsi* (Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Sumantri dan Herman dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, 2017, Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Vol. 1.
- Wahyudi, Egy, Dessy Artina, dan Widia Edorita, 2020, Analisis Yuridis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal Di Kabupaten Siak, *Jurnal JOM Fakultas Hukum* Volume VII, Nomor 2, Juli – Desember.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Paerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan- bahan Galian

Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Website :

<http://library.uir.ac.id>, tanggal 7 November 2020, Pukul 22:00.

<http://tambang.findiscussion.com/t28-pertambangan>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Tanggal 4 Juli 2020, Pukul 22:00.

http://issuu.com/borneo2020/docs/erwiza-erman-tambang_perempuan-da-negara-gagal, (diakses 2 Juni 2021).